

## Analisis Kepercayaan terhadap Perbankan

Hastiani Nasution<sup>1</sup>, Muhammad Hafizhan Fakhri<sup>2</sup>, Putri Andriani Jambak<sup>3</sup>,  
Maryam Batubara<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Perbankan Syariah, UIN-SU Medan

e-mail: [hastianinasution35@gmail.com](mailto:hastianinasution35@gmail.com)<sup>1</sup>, [fakhrimuhammadd04@gmail.com](mailto:fakhrimuhammadd04@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Putriandriani1008@gmail.com](mailto:Putriandriani1008@gmail.com)<sup>3</sup>, [maryambatubara@uinsu.ac](mailto:maryambatubara@uinsu.ac)<sup>4</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian berupa untuk menganalisis kepercayaan terhadap perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Krisis kepercayaan muncul ketika masyarakat merasa dana dan kepentingan mereka di bank tidak lagi terjamin dan aman. Kepercayaan adalah modal utama bagi industri perbankan. Dampak krisis terhadap kepercayaan perbankan berupa penarikan dana besar-besaran, penurunan investasi, penurunan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang tinggi. Cara menanggulangi krisis terhadap kepercayaan perbankan oleh pemerintah yaitu Menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat pengawasan perbankan. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejadian moneter pada krisis kepercayaan perbankan: menyediakan likuiditas darurat bagi bank. Cara penanggulangan kejadian moneter pada krisis kepercayaan perbankan dalam konteks ekonomi Islam: memaksimalkan penghimpunan zakat, mengenakan biaya atas dana yang menganggur, menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha dan meninggalkan bunga. Kebijakan pemerintah dalam pandangan ekonomi Islam terkait penyebab kejadian moneter pada krisis kepercayaan perbankan. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah berdasarkan perspektif ekonomi Islam ialah dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek berikut: Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan "Optimal", keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang.

**Kata Kunci:** *Krisis, Perbankan, Penanggulangan*

### Abstract

The aim of the research is to analyze trust in banking in Indonesia. This research uses descriptive research with a qualitative approach. A crisis of trust arises when people feel that their funds and interests in banks are no longer guaranteed and safe. Trust is the main capital for the banking industry. The impact of the crisis on banking confidence was in the form of massive fund withdrawals, decreased investment, decreased economic growth and high inflation rates. The way to overcome the crisis in banking confidence by the government is to maintain financial system stability, strengthen banking supervision. Government policy in dealing with monetary events during banking confidence crises: providing emergency liquidity for banks. Ways to overcome monetary events during banking confidence crises in the context of Islamic economics: maximizing zakat collection, charging fees for idle funds, using the principle of profit sharing in every transaction or all types of business and abandoning interest. Government policy from an Islamic economic perspective is related to the causes of monetary events in the banking confidence crisis. Policies that the government can implement based on an Islamic economic perspective are by paying attention to the following aspects: Economic prosperity with full employment opportunities and "Optimal" growth rates, socio-economic justice and equal distribution of income and wealth, stability of the value of money.

**Keywords :** *Crisis, Banking, Response*

## **PENDAHULUAN**

Prinsip kepercayaan mencakup pemahaman bahwa setiap individu yang terlibat dalam perjanjian akan memenuhi kewajiban yang telah disepakati di masa mendatang. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian harus memiliki keyakinan dan rasa saling percaya bahwa masing-masing akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Krisis kepercayaan pada perbankan dipicu oleh beberapa faktor-faktor diantaranya:

1. Skandal dan kasus korupsi:

Skandal dan kasus korupsi di bank dapat merusak reputasi bank dan menggerus kepercayaan nasabah. Kasus skandal dan kasus korupsi yang terjadi terhadap bank di Indonesia:

- a. Skandal penipuan di Citibank Indonesia “Kisah Malinda Dee 6 Tahun Bobol Rekening Nasabah Citibank”
- b. Kasus Korupsi di Bank Syariah Mandiri (BSM): Pada tahun 2013, terjadi kasus korupsi di BSM yang melibatkan beberapa oknum petinggi bank.

2. Kinerja bank yang buruk:

Kinerja bank yang buruk, seperti penurunan laba atau tingginya kredit bermasalah, dapat membuat nasabah ragu dengan kemampuan bank untuk mengelola dana mereka.

a. Kasus Penyalahgunaan Dana di Bank Syariah Bukopin:

Pada tahun 2020, bank Syariah Bukopin digegerkan dengan kasus penyalahgunaan dana senilai Rp100 miliar yang dilakukan oleh oknum karyawannya.

b. Bank mengalami kesulitan likuiditas dan banyak kredit macet:

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit/pinjaman. Jika bank mengalami kesulitan likuiditas, artinya bank tidak memiliki cukup dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti penarikan dana oleh nasabah.

3. Kondisi ekonomi yang tidak stabil:

Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan krisis kepercayaan pada perbankan. Beberapa alasan mengapa kondisi ekonomi tidak stabil dapat memicu krisis kepercayaan perbankan:

a) Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali:

Inflasi tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan nilai riil simpanan masyarakat di bank. Selain itu, inflasi juga dapat memperburuk kinerja perbankan secara keseluruhan. Masyarakat akan cenderung menarik dananya dari bank.

b) Gejolak nilai tukar mata uang:

Ketika nilai tukar mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat (AS), mengalami penguatan terhadap mata uang lokal, hal ini dapat memicu kecenderungan masyarakat untuk memiliki dolar AS. Fenomena ini bisa mengakibatkan penarikan dana dari lembaga perbankan oleh masyarakat, yang kemudian ditukarkan dengan mata uang AS. Akibatnya, terjadi penurunan jumlah uang yang tersimpan di bank. (Kamila, 2018, p. 14)

Konsekuensi dari situasi ini adalah berkurangnya cadangan likuiditas perbankan. Dengan kata lain, penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang domestik berpotensi menyebabkan penurunan ketersediaan dana likuid di sektor perbankan.

c) Kerentanan struktural dalam sistem ekonomi nasional, termasuk sektor keuangan dan perbankan, serta praktik kapitalisme yang tidak sehat, dapat menjadi faktor pemicu krisis. Proses ini umumnya diawali dengan gejolak yang memengaruhi pasar valuta asing. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah seringkali mengandalkan implementasi kebijakan moneter yang berlaku saat itu. Kelemahan

struktural dalam perekonomian nasional dapat mencakup berbagai aspek, seperti ketergantungan berlebih pada sektor tertentu, ketidakseimbangan neraca perdagangan, atau infrastruktur keuangan yang belum memadai. Sistem keuangan dan perbankan yang rapuh juga dapat memperbesar risiko krisis. (Karmeli, 2008, p. 28)

Krisis kepercayaan muncul ketika masyarakat merasa dana dan kepentingan mereka di bank tidak lagi terjamin dan aman. Kepercayaan adalah modal utama bagi industri perbankan. Ketika nasabah akan mengakibatkan penarikan dana yang sangat besar jika Anda tidak lagi percaya pada perbankan. Jika bank run menjalar ke bank lain, hal itu akan menyebabkan krisis perbankan. Bank run terjadi ketika banyak nasabah menarik dana secara bersamaan pada suatu bank karena mereka tidak percaya bahwa bank tersebut mampu membayar semua dananya tepat waktu. (Simorangkir, 2011, p. 52)

Membangun dan menjaga kepercayaan publik merupakan tugas krusial pemerintah dalam sektor perbankan. Hal ini mencakup upaya melindungi masyarakat dari tindakan tidak bertanggung jawab pihak-pihak tertentu yang dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi perbankan. Hilangnya kepercayaan ini bisa mengakibatkan kesulitan bagi bank dalam memperoleh dana untuk menjalankan operasionalnya.

Signifikansi kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan tidak bisa diremehkan. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama bagi bank dalam upayanya mengumpulkan dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Tanpa adanya kepercayaan yang kuat dari masyarakat, bank akan menghadapi tantangan besar dalam memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya secara efektif.

Kapasitas suatu bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya, termasuk melunasi hutang, mengembalikan dana nasabah, dan menyalurkan kredit tanpa keterlambatan, dikenal sebagai likuiditas. Sektor perbankan menaruh perhatian besar pada aspek likuiditas ini, mengingat kelancaran transaksi keuangan dalam melayani nasabah berperan vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap stabilitas, efisiensi, dan kompetensi operasional bank. (Putera, 2020, p. 137)

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, telah menetapkan parameter spesifik untuk mengevaluasi tingkat likuiditas lembaga perbankan. Di antara berbagai indikator yang ada, Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi salah satu tolok ukur likuiditas yang paling sering digunakan dalam industri perbankan. LDR berfungsi untuk mengukur sejauh mana dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. (Carindri et al., 2013, p. 265)

Berbicara tentang penyebab krisis finansial, krisis perbankan adalah salah satu dari dua sudut pandang utama. Pandangan pertama berpendapat bahwa dasar ekonomi yang lemah dan ketidakkonsistenan kebijakan adalah penyebab utama krisis. Efek kontangion dan pasar yang tidak rasional adalah penyebab kedua krisis.

Efek kontak adalah perspektif kedua tentang sumber krisis perbankan. Kerangka dasar Diamond dan Dybvig (1983) digunakan untuk membahas dua kategori deposit dalam diskusi ini. Pasar antar bank muncul dalam konteks ini karena bank dipisahkan secara spasial. Dengan asumsi bahwa tidak ada resiko likuiditas agregat, pasar antar bank akan menjamin bahwa bank tidak akan runtuh karena guncangan likuiditas regional. Bagaimanapun juga situasi normal dalam hubungan bank, pasar antarbank akan memungkinkan risiko dibagi secara ideal dan gangguan tidak akan menyebabkan penyakit menular. Jika pasar antarbank mengalami guncangan likuiditas yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi, dapat terjadi contangon, atau penurunan.

Jika terjadi guncangan likuiditas, sebuah bank dapat jatuh, yang berarti bahwa obligasi pasar antar bank tidak akan dibayarkan karena kurangnya likuiditas. Jika likuiditas terbatas, bank lain juga akan mengalami hal yang sama.

Dampak lanjutannya bergantung pada struktur pasar saat ini, yang dipengaruhi oleh faktor luar. Terbatas pada bank-bank terdekat jika pasar antarbank tidak sempurna. Efek penularan meningkat dengan kesempurnaan pasar, yang berarti lebih banyak bank yang

mengalami guncangan likuiditas, membuka peluang bagi bank. Tingkat kegagalan yang lebih rendah karena kerusakan dapat menyebar ke lebih banyak bank.

Krisis dan masalah serius di sektor perbankan dapat terjadi karena perubahan yang terjadi dengan cepat dalam sektor riil, internal perbankan, dan beberapa indikator ekonomi. Berikut ini adalah beberapa indikator ekonomi yang dianggap sebagai penyebab krisis perbankan: (I) penurunan tajam dalam pertumbuhan PDB riil; (II) kenaikan suku bunga riil; (III) penurunan ICOR; (IV) penurunan tajam dalam tingkat suku bunga dan depresiasi nilai tukar; dan (v) peningkatan pesat dalam inflasi, ekspansi kredit.

Ketika keadaan makroekonomi memburuk, biasanya terjadi krisis perbankan. Peningkatan risiko di sektor perbankan erat terkait dengan penurunan pertumbuhan PDB, dan inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan risiko pada sektor tersebut. Sektor perbankan, dan upaya untuk menstabilkan inflasi menyebabkan peningkatan tajam pada suku bunga riil, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis perbankan.

Rasio profitabilitas yang diprosikan dengan net interest margin memiliki hubungan yang negatif dengan kemungkinan terjadinya krisis perbankan. Hal tersebut membuktikan peningkatan pendapatan akan menjaga stabilitas perbankan dan menunjukkan kinerja perbankan yang baik. (Zakaria & Musdholifah, 2021, p. 20) Penularan dari Thailand mengganggu keseimbangan. Pasar valas dan pasar modal tidak berjalan bersamaan. Sementara investasi dalam aset fisik menurun, investasi dalam aset keuangan meningkat pesat. (Sari & Fakhrudin, 2016, p. 382)

## **METODE**

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif bertujuan guna mendeskripsikan, menjelaskan, mendeskripsikan, dan merespons secara lebih akurat permasalahan yang ingin diselidiki melalui suatu kejadian. Sistem pengumpulan data adalah studi literatur yang terdapat dalam buku, internet, majalah, website, atau artikel otoritatif dan analisis penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan erat pada masalah yang ditemukan peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Krisis Kepercayaan Terhadap Perbankan**

1. Penarikan dana besar-besaran:  
Krisis kepercayaan dapat menyebabkan nasabah menarik dana mereka secara besar-besaran dari bank. Hal ini dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas dan bahkan kolaps.
2. Penurunan investasi:  
Krisis kepercayaan dapat menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi di bank. Hal ini dapat menyebabkan bank kesulitan untuk mendapatkan dana dan membiayai kegiatannya.
3. Penurunan pertumbuhan ekonomi:  
Krisis kepercayaan dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena bank memainkan peran penting dalam menjembatani antara penabung dan peminjam.
4. Periode inflasi yang signifikan dalam rentang waktu beberapa bulan dapat dikaitkan dengan potensi penyesuaian nilai tukar mata uang asing ke level yang lebih realistis atau wajar. Meskipun terjadi penurunan harga barang dan jasa dari puncak tertingginya ke tingkat yang lebih terjangkau, namun sulit bagi harga-harga tersebut untuk kembali ke posisi awal seperti sebelum terjadinya gejolak moneter. (Tarmidi, 1999, p. 17)

Peningkatan suku bunga menciptakan daya pikat yang lebih besar bagi nasabah untuk menempatkan dananya di lembaga perbankan konvensional. Namun, bagi para investor yang memiliki tanggungan finansial yang cukup besar, kenaikan suku bunga ini mungkin tidak cukup menarik. Di sisi lain, bank syariah mungkin menghadapi tantangan

dalam menarik minat masyarakat umum untuk menyimpan dana, mengingat margin keuntungan yang ditawarkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan imbal hasil simpanan di bank konvensional. (Sudarsono, 2009, p. 18)

Berdasarkan faktor-faktor yang menentukan besarnya dampak finansial dari krisis perbankan, maka dampak finansial dari krisis perbankan adalah sebagai berikut:

1. Agregat kredit dan moneter menjadi agak tidak stabil selama krisis, terutama jika agregat tersebut terus meningkat hingga awal krisis. Hal ini sering terjadi di negara-negara di mana liberalisasi sektor keuangan tidak menghasilkan peningkatan kontrol perbankan.
2. Sebelum krisis perbankan, kecepatan pendapatan biasanya menurun. Hal ini sesuai dengan hipotesis tentang stabilitas permintaan uang jangka panjang selama krisis: tingkat pendapatan dapat berubah selama krisis, meskipun permintaan uang tidak stabil dalam jangka pendek.
3. Karena turunnya rasio cadangan terhadap simpanan (seperti yang terlihat di Argentina) dan berkurangnya kelebihan cadangan (seperti yang terlihat di Venezuela), multiplier uang cenderung meningkat sebelum krisis. Namun, sebelum krisis, koefisien turun di Estonia dan Lituania. Ini terkait dengan peraturan pinjaman yang lebih ketat dan peningkatan tajam rasio mata uang terhadap deposito sebelum krisis. Selama krisis, multiplier uang bergerak cepat di seluruh negara yang diteliti. Perubahan dalam permintaan dan cadangan devisa dapat menyebabkannya.
4. Selama krisis perbankan, mekanisme transmisi kredit dan tingkat suku bunga mungkin berubah. Dengan batas kredit yang tidak efektif, permintaan pinjaman menjadi lebih inelastis, seiring dengan penurunan moral hazard kredit macet bank. Karena bank tidak dapat menyesuaikan pinjamannya sesuai dengan kebijakan moneter, kurva suku bunga akan terhenti. Setelah krisis, mekanisme transmisi biasanya berubah, termasuk perubahan pada struktur sistem perbankan, jumlah bank, dan konsentrasi aset dan liabilitis.
5. Secara umum, sistem pembayaran terpengaruh buruk oleh krisis perbankan. Hal ini dapat terjadi karena bank tidak lagi mempercayai surat berharga, yang biasanya digunakan sebagai alat tukar.
6. Dengan adanya penarikan dana oleh investor asing di berbagai bisnis, perbankan Indonesia mengalami krisis likuidasi dan penurunan nilai aktif produktif dalam bentuk kredit dan surat berharga yang dibeli. (Sullivan & Widodoatmodjo, 2021)

### **Cara Menanggulangi Penyebab Kejadian Moneter Pada Krisis Kepercayaan Perbankan**

#### **1. Menjaga stabilitas sistem keuangan**

Mempertahankan keseimbangan dalam sistem finansial merupakan aspek krusial, meskipun terminologi “stabilitas sektor keuangan” sudah familiar di kalangan pelaku pasar keuangan. Namun, tidak ada salahnya untuk kembali menelaah makna dari frasa tersebut. Perlu dicatat bahwa tidak ada satu definisi yang berlaku universal untuk konsep stabilitas sektor keuangan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penting untuk membedakan antara stabilitas moneter dan stabilitas keuangan. Stabilitas moneter berkaitan dengan kestabilan harga yang tercermin dalam nilai mata uang yang stabil. Sementara itu, stabilitas keuangan mencakup kestabilan lembaga-lembaga keuangan serta pasar yang terintegrasi dalam ekosistem finansial. Pada hakikatnya, kondisi “ketidakstabilan sektor keuangan” adalah situasi yang perlu dihindari. Terdapat korelasi yang erat antara stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter; keseimbangan dalam sistem keuangan hanya dapat terwujud jika didukung oleh fondasi moneter yang stabil.

Menjaga stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu aspek krusial dalam mencegah dan menanggulangi krisis kepercayaan pada perbankan. Menjaga inflasi dan nilai tukar dalam kondisi stabil, Membuat kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik, Mengoptimalkan fungsi bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan. Jika stabilitas sistem keuangan dapat terjaga dengan baik, maka kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan juga akan lebih kokoh dan krisis dapat dihindari atau diminimalisir dampaknya.

## 2. Memperkuat pengawasan perbankan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 6, menguraikan prinsip-prinsip fundamental dan mandat utama yang menjadi landasan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi sektor perbankan. Regulasi ini memberikan wewenang kepada OJK untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap industri keuangan, termasuk di dalamnya sektor perbankan. Tujuan utama dari kewenangan ini mencakup upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta mendorong perkembangan industri keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Aspek krusial dari kebijakan ini terletak pada tanggung jawab OJK dalam mengambil langkah-langkah preventif dan mitigasi terhadap potensi krisis finansial yang dapat mengancam kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, OJK diberi mandat untuk tidak hanya mengawasi, tetapi juga proaktif dalam mencegah dan menangani gejolak yang mungkin timbul dalam ekosistem keuangan nasional. (Sudirman et al., 2024, p. 299)

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam Pasal 29 ayat (1), menetapkan bahwa tanggung jawab untuk membina dan mengawasi lembaga perbankan berada di tangan Bank Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan mandat yang diberikan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan regulasi tersebut, menjadi jelas bahwa diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas sektor perbankan di Indonesia. Hal ini mencerminkan pentingnya menyelami kompleksitas dan signifikansi tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan memantau aktivitas perbankan nasional. (Hikmah, 2007, p. 516)

Dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap perbankan, diharapkan risiko-risiko yang dapat memicu krisis kepercayaan dapat diminimalisir. Masyarakat akan merasa lebih aman dan terjamin ketika perbankan diawasi secara ketat oleh otoritas yang kompeten dan independen. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan akan semakin meningkat, yang merupakan modal penting bagi stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan.

Upaya peningkatan ketahanan likuiditas dalam industri perbankan, penerapan strategi yang berhubungan dengan keseimbangan neraca pembayaran, serta pengelolaan laju pertumbuhan pinjaman pada level yang mendukung sasaran perkembangan ekonomi merupakan langkah-langkah krusial yang perlu diimplementasikan. Rangkaian kebijakan ini dirancang sebagai antisipasi terhadap konsekuensi dari fenomena kelangkaan likuiditas global dan sebagai upaya untuk menopang ekspansi ekonomi melalui pemeliharaan tingkat pertumbuhan kredit yang stabil dan terkendali. (Nafi'Hasbi, 2019, p. 387)

Menyelesaikan masalah utang luar negeri sektor swasta, meningkatkan kapasitas perbankan domestik, dan memulihkan kepercayaan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri, terhadap kemampuan ekonomi Indonesia guna menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar dan sesuai. (Herawati & Gustan, 2020, p. 23)

## **Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kejadian Moneter Pada Krisis Kepercayaan Perbankan**

### 1. Menyediakan Likuiditas Darurat bagi Bank

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 32 ayat (3) dan Penjelasan Umum angka III huruf b UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia (BI) memiliki wewenang untuk memberikan kredit BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas dalam keadaan darurat. Ini memberikan BI otoritas untuk bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir.

Dalam rangka mendukung program pemerintah, Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dengan tujuan meningkatkan produksi serta tujuan

lainnya. Sebagai lender of the last resort, Bank Sentral juga berwenang memberikan kredit likuiditas guna membantu bank-bank mengatasi masalah likuiditas yang muncul dalam situasi darurat.

Menurut ahli ekonomi, krisis ekonomi adalah ketika warga negara tidak percaya pada pemerintahnya, terutama dalam hal keuangan. Krisis ekonomi global adalah ketika satu sektor ekonomi pasar global runtuh dan berdampak pada sektor lain di seluruh dunia. Negara-negara Asia yang sedang berkembang terkena dampak yang signifikan dari krisis ekonomi yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat. Negara Indonesia memiliki hutang terhadap negara lain yang bunganya terus meningkat setiap tahunnya. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi global, pendapatan Indonesia tidak meningkat, yang membuat negara tersebut kesulitan membayar hutang-hutangnya. (Sari & Fakhruddin, 2016, p. 379)

## 2. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Dengan perannya dalam menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus kepada pihak yang membutuhkan, sistem keuangan memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian. (Sitorus et al., 2022, p. 141)

### **Cara Penanggulangan Kejadian Moneter Pada Krisis Kepercayaan Perbankan Dalam Konteks Ekonomi Islam.**

1. Memaksimalkan penghimpunan zakat serta pengoptimalan pemanfaatannya: Zakat dapat dimaksimalkan untuk kegiatan yang membantu menjaga stabilitas ekonomi. Ini dilakukan dengan asumsi bahwa perekonomian berada dalam kondisi full employment, dan pendapatan riil nasional tidak akan meningkat karena peningkatan permintaan agregat.
2. Pengenaan biaya atas dana yang tidak digunakan (cost of idle fund): Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendorong masyarakat agar menginvestasikan dananya, tidak hanya melalui tabungan dan deposito, tetapi juga ke sektor riil yang sedang berkembang. Dengan adanya biaya ini, setiap individu diharuskan untuk menginvestasikan dananya.
3. Konsep dasar Keadilan: Ekonomi Islam menekankan keadilan dan keseimbangan dalam semua aspek ekonomi, termasuk distribusi kekayaan dan akses ke sumber daya.

Dengan meninggalkan bunga, konsep pembagian keuntungan dan risiko dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi dan bisnis. Sistem ini mengatur bahwa setiap pihak yang berpartisipasi akan menerima bagian dari laba atau menanggung kerugian sesuai dengan kontribusi modal mereka. Dengan pendekatan ini, berbagai transaksi, baik dalam ranah privat maupun pemerintahan, mampu menerapkan prinsip pembagian hasil tanpa bergantung pada mekanisme bunga. (Nasikin et al., 2020)

Kesuksesan bank syariah dalam menghadapi krisis ekonomi global bukan hanya karena fondasi ekonomi yang kukuh. Selain itu, ada dukungan dari masyarakat yang terus bergantung pada bank syariah. Ekonomi syariah mengadopsi beberapa prinsip penting yang tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut: tunduk pada aturan agama, tidak ada bunga atau riba yang dikenakan pada transaksi, uang hanya diinvestasikan untuk tujuan mulia (halal), ada pembagian risiko antara mitra bisnis, dan pembiayaan harus didasarkan pada aset riil.

Dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, urusan agama dan perbankan terpisah. Ini berarti bahwa bank hanya tunduk pada undang-undang yang ditetapkan oleh orang yang memiliki otoritas. Dalam agama Islam, ada seperangkat ajaran yang lengkap tentang manajemen harta. Allah SWT adalah pemilik tunggal harta dalam agama Islam.

Zakat harus dibayar oleh orang kaya karena harta mereka adalah amanah. Zakat dihitung berdasarkan jumlah aset dan harta mereka, bukan pendapatan. Zakat adalah memberikan hak orang miskin. Hidup menjadi lebih aman, tenang, berkah, dan menguntungkan di dunia akhirat jika Anda menerapkan gagasan ini dalam kehidupan Anda.

Dalam sistem konvensional, riba dikenakan pada setiap transaksi. Riba adalah jenis transaksi bisnis yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lainnya, yang diharamkan dalam sistem ekonomi syariah. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dijunjung tinggi oleh ekonomi syariah dikenal sebagai pengharaman riba. (Pristiwiyanto, 2020, p. 43)

Mereka yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang, biasanya bank sentral, otoritas moneter, departemen keuangan, atau institusi lain yang ditunjuk, mendapatkan keuntungan dari menggunakan fiat money. Persentase uang yang ditambahkan ke perekonomian akan menentukan apakah daya beli uang akan turun atau inflasi akan terjadi. (Rusydia, 2013, p. 23)

### **Kebijakan Pemerintah Dalam Pandangan Ekonomi Islam Terkait Penyebab Kejadian Moneter Pada Krisis Kepercayaan Perbankan**

Pasti ada kebijakan dan strategi pemerintah untuk menangani situasi yang sangat tidak kondusif dan pandemi, terutama perbankan syariah. Karena perilaku bertransaksi masyarakat telah bergeser dari konvensional menuju digitalisasi ini, seiring dengan peningkatan populasi pengguna smartphone. Industri perbankan harus melakukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan alat elektronik atau digital mereka, dan/atau melalui media digital yang dimiliki oleh calon nasabah dan/atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan bank memungkinkan calon nasabah dan calon nasabah mendapatkan layanan perbankan secara mandiri (self-service) tanpa harus mengunjungi bank. (Rois & Sugianto, 2021)

Fasilitas diskonto (Discounto Rate) tingkat bunga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk bank umum yang memberikan jaminan kepada bank sentral. Bank sentral memiliki tanggung jawab untuk memelihara kredibilitas sistem perbankan di mata publik saat melakukan pengawasan terhadap aktivitas bank-bank komersial. Salah satu strategi kunci dalam hal ini adalah dengan menjamin kemampuan bank-bank komersial untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran cek nasabahnya. Langkah pertama untuk mencapai tujuan ini melibatkan penetapan pedoman atau regulasi yang mengatur pola dan kategori investasi yang diizinkan bagi bank-bank komersial. Langkah berikutnya adalah dengan menyediakan fasilitas pinjaman kepada lembaga-lembaga perbankan yang memiliki cadangan di bawah ambang batas minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. (Latifah, 2015)

Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam: Beberapa mazhab menggunakan moneter sebagai instrumen kebijakan antara lain:

#### 1. Mazhab Iqtishaduna

Pada awal Islam, kebijakan moneter tidak diperlukan karena tidak ada sistem perbankan dan penggunaan uang yang sangat kecil. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang memadai untuk menggunakan diskresioner untuk mengubah penawaran uang. Karena kredit hanya digunakan, itu tidak membantu menciptakan uang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang instrument negosiasi (negotiable instruments) dan surat peminjaman (promissory notes) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk menghasilkan uang di kalangan pedagang.

Surat janji atau tukar faktur dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan uang baru, tetapi tidak dapat digunakan dengan kredit. Aturan ini berdampak pada keseimbangan pasar barang dan uang yang bergantung pada transaksi tunai. Uang yang diberikan atau diterima dalam nasi'a atau aturan transaksi lainnya dengan tujuan mendapatkan barang atau jasa. OMO, atau jual-beli surat berharga pemerintah, adalah alat lain yang saat ini digunakan untuk mengontrol peredaran uang dan tingkat suku bunga jangka pendek. Selain itu, hukum Islam melarang menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga.

#### 2. Mazhab Mainstream

Kebijakan moneter pemerintah bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya seoptimal mungkin untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan hasil. Alquran melarang

penumpukan uang, atau menyimpan uang, karena membuat uang tersebut tidak menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu, mazhab ini membuat instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengubah seberapa besar atau seberapa kecil jumlah uang yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan, alat ini harus digunakan. Dalam Islam, ada dua jenis permintaan: transaksi (transaksional) dan berjaga-jaga. Peningkatan volume dana yang tidak digunakan secara produktif berbanding lurus dengan kenaikan kebutuhan akan likuiditas untuk tujuan antisipasi. Di sisi lain, penurunan jumlah dana yang tidak dimanfaatkan berkorelasi positif dengan peningkatan beban fiskal yang dibebankan pada aset yang tidak produktif. Kebijakan pengenaan biaya atas dana yang tidak digunakan diterapkan pada seluruh aset yang memiliki potensi produktif namun sedang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah berdasarkan perspektif ekonomi Islam ialah dengan memperhatikan beberapa aspek–aspek berikut:

a. Kesejahteraan Ekonomi dengan Kesempatan Kerja Penuh dan Laju pertumbuhan “Optimal”

Keimanan Islam bahwa manusia adalah khalifah Allah di dunia menunjukkan bahwa manusia harus menjalani kehidupan sesuai dengan posisi mereka. Dimaksudkan untuk membantu mereka mencapai tujuan-tujuan ini adalah petunjuk Allah yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Para fuqaha setuju bahwa tujuan utama syariah adalah kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan. Dalam bidang ekonomi, perspektif ini mengatakan bahwa kesejahteraan ekonomi dicapai dengan memenuhi semua kebutuhan pokok manusia, menghilangkan semua sumber kesulitan dan ketidaknyamanan, dan meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material. Selain itu, ia menuntut suatu kondisi keuangan di mana khalifah Allah dapat memanfaatkan waktu dan kekuatan fisik atau mentalnya untuk membantu dirinya sendiri, keluarganya, dan komunitasnya.

Oleh karena itu, sistem Islam harus berfokus pada penggunaan sumber daya manusia secara penuh dan efisien, karena ini akan membantu mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi yang luas dan menanamkan martabat manusia yang diperlukan oleh status khalifah. Selain itu, tujuan yang sangat penting adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif dan penuh karena, menurut Islam, semua sumber daya di Bumi dan Langit diciptakan untuk kepentingan manusia dan harus digunakan secara efektif dan penuh tanpa merusak atau membuang-buang sumber daya untuk tujuan yang dimaksudkan. Program solidaritas sosial Islam memberikan bantuan yang layak bagi mereka yang tidak dapat bekerja tanpa stigma dan prasangka.

b. Keadilan Sosioekonomi dan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Merata

Islam sangat mementingkan kebersamaan antar manusia. Karena itu, Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam ekonomi dan sosial, serta pembagian kekayaan yang adil. Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan ini. Tanpa kedua hal ini, sulit membayangkan adanya masyarakat Islam yang ideal. Keadilan dan persaudaraan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam ajaran Islam.

Keadilan dan persaudaraan dalam Islam tidak bisa tercapai tanpa pembagian penghasilan dan harta yang merata. Kedua hal ini saling berhubungan erat dalam ajaran Islam. Bagi umat Muslim, mewujudkan keadilan dan persaudaraan adalah kewajiban spiritual. Berbeda dengan sistem kapitalis, yang lebih didorong oleh tekanan kelompok daripada kepedulian terhadap keadilan ekonomi dan sosial. Akibatnya, sistem kapitalis, terutama di sektor bank dan keuangan, gagal mencapai keadilan. Ketimpangan kekayaan dan penghasilan terus terjadi. Meskipun ada upaya mengurangi ketidakadilan melalui pajak dan bantuan sosial karena tekanan politik, hasilnya belum memuaskan. Usaha-usaha ini tidak cukup berhasil mengatasi masalah ketidakadilan yang ada.

c. Stabilitas nilai uang

Karena Islam sangat menekankan kejujuran dan keadilan dalam hubungan antarmanusia, stabilitas nilai mata uang harus menjadi tujuan utama dalam kerangka

referensi Islam. Al-Qur'an juga dengan tegas menekankan kejujuran dan keadilan dalam semua ukuran nilai. "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil." (al-An'aam: 152) Artinya, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kurangkan takaran dan timbangan untuk orang lain, dan jangan membuat kerusakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. (al-A'raaf: 85; lihat juga surah Huud: 84-85, al-Israa: 35, dan asy-Syu'araa': 181) Hal demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu orang yang benar-benar beriman.

Tindakan-tindakan ini tidak hanya wajib bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Mereka melampaui takaran dan timbangan yang biasa digunakan. Ia seharusnya mencakup semua ukuran nilai. Selain itu, uang berfungsi sebagai pengukur nilai. Akibatnya, menurut ajaran Al-Qur'an, setiap erosi yang signifikan dan terus-menerus dalam nilai sebenarnya sebanding dengan menyebabkan kerusakan di Bumi karena efek negatif erosi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Dalam sistem ekonomi Islam, ada cara-cara khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilannya. Islam tidak menggunakan bunga atau mencetak uang baru secara berlebihan. Islam juga tidak menganjurkan kebijakan anggaran defisit untuk tujuan ini. Sebaliknya, Islam mendorong beberapa praktik keuangan yang baik: Pinjaman tanpa bunga (qard), sedekah atau donasi, kerjasama bisnis yang saling menguntungkan (mudharabah). Praktik-praktik ini bertujuan untuk melancarkan arus uang dalam masyarakat, terutama untuk membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi semua orang. Islam juga mengajarkan bahwa uang tidak boleh ditimbun tanpa digunakan. Selain itu, meminjamkan uang dengan bunga juga dilarang. Tujuannya adalah agar uang terus berputar dalam ekonomi dan memberi manfaat bagi banyak orang. Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau kebijakan defisit anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan stabilitas. Dianjurkan untuk melakukan pinjaman qard, sedekah, dan kerjasama bisnis dalam bentuk mudharabah, agama Islam mengajarkan untuk mempercepat aliran dana untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, likuiditas tidak boleh ditimbun atau dipinjamkan dengan bunga. (Ibrahim, 2012, p. 43)

## **SIMPULAN**

Krisis kepercayaan muncul ketika masyarakat merasa dana dan kepentingan mereka di bank tidak lagi terjamin dan aman. Kepercayaan adalah modal utama bagi industri perbankan. Akan terjadi penarikan dana besar-besaran ketika pelanggan kehilangan kepercayaan pada perbankan. Jika bank run menjalar ke bank lain, itu akan menjadi krisis perbankan. Bank run terjadi ketika banyak nasabah secara bersamaan menarik dana besar-besaran pada suatu bank karena mereka tidak percaya bahwa bank tersebut mampu membayar semua dananya tepat waktu.

Dampak krisis terhadap kepercayaan perbankan berupa penarikan dana besar-besaran, penurunan investasi, penurunan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang tinggi. Cara menanggulangi krisis terhadap kepercayaan perbankan oleh pemerintah yaitu Menjaga stabilitas sistem keuangan,memperkuat pengawasan perbankan. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejadian moneter pada krisis kepercayaan perbankan: menyediakan likuiditas darurat bagi bank. Cara penanggulangan kejadian moneter pada krisis kepercayaan perbankan dalam konteks ekonomi Islam: memaksimalkan penghimpunan zakat , mengenakan biaya atas dana yang menganggur, menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha dan meninggalkan bunga. Kebijakan pemerintah dalam pandangan ekonomi Islam terkait penyebab kejadian moneter pada krisis kepercayaan perbankan.

Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah berdasarkan perspektif ekonomi Islam ialah dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek berikut: Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan "Optimal", keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carindri, F., Filona, F., & Putri, M. (2013). Pengaruh likuiditas bank dan kredit bermasalah terhadap tingkat kecukupan modal. *Prosiding PESAT*, 5. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+pengaruh+likuiditas+bank+dan+kredit+bermasalah+terhadap+tingkat+kecukupan+modal+proceeding+pesat&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+pengaruh+likuiditas+bank+dan+kredit+bermasalah+terhadap+tingkat+kecukupan+modal+proceeding+pesat&btnG=)
- Herawati, H., & Gustan, M. (2020). Penyebab dan Upaya yang Dilakukan Para Pemerintah Dunia Saat Krisis Global 2008. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 2(1), 22–29. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+penyebab+upaya+yang+dilakukan+para+pemerintah++dunia+saat+krisis+global+2008&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+penyebab+upaya+yang+dilakukan+para+pemerintah++dunia+saat+krisis+global+2008&btnG=)
- Hikmah, M. (2007). Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(4), 514–534. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+fungsi+bank+indonesia+sebagai+pengawas+perbankan+di+indonesia&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+fungsi+bank+indonesia+sebagai+pengawas+perbankan+di+indonesia&btnG=)
- Ibrahim, Z. (2012). Sistem Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Alqalam Jurnal Kajian Keislaman*, 9. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+sistem+moneter+dalam+perspektif+ekonomi+islam+&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+sistem+moneter+dalam+perspektif+ekonomi+islam+&btnG=)
- Kamila, N. (2018). Pengaruh kinerja keuangan dan variabel ekonomi makro terhadap likuiditas perbankan (studi pada Industri Perbankan Di Indonesia Tahun 2010-2016). Universitas Brawijaya. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal++pengaruh+kinerja+keuangan+dan+variabel+ekonomi+makro+terhadap+likuiditas++perbankan+&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal++pengaruh+kinerja+keuangan+dan+variabel+ekonomi+makro+terhadap+likuiditas++perbankan+&btnG=)
- Karmeli, E. (2008). Krisis Ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(2). [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+krisis+ekonomi+indonesia+elly+karmeli&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+krisis+ekonomi+indonesia+elly+karmeli&btnG=)
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11(2), 124–134. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+kebijakan+moneter+dalam+dalam+perspektif+ekonomi+syariah&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+kebijakan+moneter+dalam+dalam+perspektif+ekonomi+syariah&btnG=)
- Nafi'Hasbi, M. Z. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+dampak+krisis+keuangan+global+terhadap+perbankan+di+indonesia+perbankan+m+zidny+nafi+hasbi++++++ndingan+antara+bank+konvensional+dan+bank+syariah&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+dampak+krisis+keuangan+global+terhadap+perbankan+di+indonesia+perbankan+m+zidny+nafi+hasbi++++++ndingan+antara+bank+konvensional+dan+bank+syariah&btnG=)
- Nasikin, Y., Sahudi, S., & Amris, A. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional Periode Tahun 2015-2018ⓈStudi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk). *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 75–97. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+PENGARUH+INFLASI+TERHADAP+PROFITABILITAS+PADA+BANK+SYARIAH+DAN+BANK+KONVENSIONAL+PERIODE+TAHUN+2015-2018&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+PENGARUH+INFLASI+TERHADAP+PROFITABILITAS+PADA+BANK+SYARIAH+DAN+BANK+KONVENSIONAL+PERIODE+TAHUN+2015-2018&btnG=)
- Pristiwiyanto, P. (2020). Ekonomi Syariah solusi krisis keuangan global. *Al Iqtishod*, 8(1), 39–45. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+ekonomi+syariah+solusi+krisis+keuangan+global+pristiwiyanto&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+ekonomi+syariah+solusi+krisis+keuangan+global+pristiwiyanto&btnG=)
- Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 457294. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+prinsip+kepercayaan+sebagai+fondasi+utama+kegiatan+perbankan+&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+prinsip+kepercayaan+sebagai+fondasi+utama+kegiatan+perbankan+&btnG=)

- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 1(1), 1–8. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+kekuatan+perbankan+syariah+di+masa+krisis+adilb+khusnul+rois&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+kekuatan+perbankan+syariah+di+masa+krisis+adilb+khusnul+rois&btnG=)
- Rusydiana, A. S. (2013). Krisis Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam Pemberdayaan Ekonomi Umat dari Perspektif Islam. *Harmoni*, 12(2), 21–30. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+krisis+ekonomi+dalam+perspektif+ekonomi+islam+pemberdayaan+ekonomi+umat+dari+perspektif+islam&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+krisis+ekonomi+dalam+perspektif+ekonomi+islam+pemberdayaan+ekonomi+umat+dari+perspektif+islam&btnG=)
- Sari, P. K., & Fakhruddin, F. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 377–388. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+identifikasi+penyebab+krisis+moneter+dan+kebijakan+bank+sentral+di+indonesia&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+identifikasi+penyebab+krisis+moneter+dan+kebijakan+bank+sentral+di+indonesia&btnG=)
- Simorangkir, I. (2011). Penyebab Bank Runs di Indonesia: Bad Luck atau Fundamental? *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 14(1), 51–78. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+penyebab+bank+runs+di+indonesia+bad+luck+fundamental&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+penyebab+bank+runs+di+indonesia+bad+luck+fundamental&btnG=)
- Sitorus, A. P., Majid, M. S. A., & Handayani, R. (2022). Krisis Keuangan Masa Depan dan Sistem Keuangan Baru. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 136–146. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+krisis+keuangan+masa+depan+dan+sistem+keuangan+baru&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+krisis+keuangan+masa+depan+dan+sistem+keuangan+baru&btnG=)
- Sudarsono, H. (2009). Dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di indonesia: perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. *La\_Riba*, 3(1), 12–23. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+dampak+krisis+keuangan+global+terhadap+perbankan+di+indonesia+perbandingan+antara+bank+konvensional+dan+bank+syariah&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+dampak+krisis+keuangan+global+terhadap+perbankan+di+indonesia+perbandingan+antara+bank+konvensional+dan+bank+syariah&btnG=)
- Sudirman, D. C., Husna, N. A., Alaika, S. P., Syahranni, A., & Azdy, D. (2024). Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Perbankan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 292–301. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+otoritas+jasa+keuangan+dalam+melindungi+nasabah+perbankan&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+otoritas+jasa+keuangan+dalam+melindungi+nasabah+perbankan&btnG=)
- Sullivan, V. S., & Widoatmodjo, S. (2021). Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (COVID–19). *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(1), 257–266. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+kinerja+keuangan+bank+sebelum+dan+selama+pandemi+covid+19+veronica+stephani&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+kinerja+keuangan+bank+sebelum+dan+selama+pandemi+covid+19+veronica+stephani&btnG=)
- Tarmidi, L. T. (1999). Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF dan saran. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 1(4), 1–25. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+krisis+moneter+indonesia+sebab+dampak+peran+lepi+tarmidi&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+krisis+moneter+indonesia+sebab+dampak+peran+lepi+tarmidi&btnG=)
- Zakaria, A. A., & Musdholifah, M. (2021). Prediksi Krisis Perbankan di Indonesia Menggunakan CD Indeks. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1), 11–30. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+prediksi+krisis+perbankan+di+indonesiamenggunakan+cd+indeks+amir+ambayah+zakaria&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+prediksi+krisis+perbankan+di+indonesiamenggunakan+cd+indeks+amir+ambayah+zakaria&btnG=)